

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib, 2014, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agussalim, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ali, Chidir, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary with Pronunciations 6 ed*, West Publishing CO, United States Of America, 1990.
- Budiono, Herlien, 2013, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chatamarrasjid, 2000, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Sosial Bertujuan Laba*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Emerson, Andrews, 1963, *Philantropic Foundation*, Russell Sage Foundation, New York.
- Fatmawati, 2005, *Hak Menguji Toetsingrecht*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2016, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indrati, S., Maria Farida., *Ilmu PerUndang-Undangan*, PT Kanisius, Yogyakarta.
- James Crawford, 2012, *Brownlie's Principle Of Public International Law Eighth Edition*, Oxford University Press, United Kingdom.

- Kansil C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1961, *General Theory of Law and State*, Diterjemahkan oleh: Anders Wedberg, New York, Russell & Russell.
- Komar, Andasasmita, 1981, *Notaris I*, Sumur Bandung, Bandung.
- Lebacqz, Karen, 2011, *Teori teori Keadilan Six Theories of Justice terj. Yudi Santoso*, Nusa Media, Bandung.
- Manan, Bagir, 1987, *Peranan Peraturan PerUndang-Undangan Dalam Pembinaan hukum Nasional*, Armico, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Refisi*, Kencana, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2014, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk – Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mulyoto, 2016, *Legal Standing*, Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Murjiyanto, 2011, *Badan Hukum Yayasan (Aspek Pendirian Dan Tanggung Jawab) Cet. 1*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Notodisoeryo, R. Sugondo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta.
- Perangin, Effendi, 2016, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prasetya, Rudhi, 2012, *Yayasan Dalam Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 1998, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Retnoningsih, Ana, dan Suharso, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang

Soebechi, Imam, 2016, *Hak Uji Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2013, *Penelitian Hukum Normative, Suatu Tinjauan Singkat, Cet.15*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tedjosaputro, Liliana, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

Thalib, Abdul Rasyid. 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Widyadharma, Ignatius Ridwan, 2001, *Badan Hukum Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001) Cet. 1*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004, tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 122 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6215.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali
Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan
Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali
Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi
Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan
Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Yayasan.

Jurnal dan Makalah Ilmiah

Dewi, Yetty Komalasari, *Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan
Tentang Yayasan, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional,*
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI.
BPHN 2013, Jakarta, 2013.

Erlina, *Analisis Regulasi Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Pada Yayasan
Pendidikan, Al-'Adl, Makassar Vol. 13 No. 1, Januari, 2020.*

Kusrini, Purwijanti, *Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia,*
Notarie, Universitas Airlangga, Vol. 01 No. 1, Juni, 2018.

Listiyanto, Apri, *Kompendium Hukum Yayasan, Pusat Perencanaan
Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum Dan Ham RI. BPHN 2012, Jakarta, 2012.*

MD, Mahfud, *Penuangan Pancasila Dalam Peraturan PerUndang-Undangan,*
*Makalah disampaikan pada Seminar Nasional "Aktualisasi Nilai – Nilai
Pancasila dalam Pendidikan ilmu hukum dan PerUndang-Undangan
indonesia", diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM dalam Rangka
Peringatan Hari Lahir Pancasila di Yogyakarta, 30 – 31 mei, 2007.*

Rahman, Mokhammad Dafirul Fajar, *Kewenangan, Kewajiban Notaris dan Calon Notaris dalam Membuat Akta Autentik*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

Sanjaya, Ryan, *"Kajian Terhadap Kepailitan Notaris Di Indonesia"*, Diponegoro Law Journal, Semarang, Volume 5, Nomor 4, 2016.

Sitorus, Dwi Cesaria, *Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Yayasan Dalam Rangka Mencegah Praktik Pencucian Uang (Money Laundering)*, Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi, Feb-Mei 2013. Volume I Nomor 1, 2013.

Sulistiyono, *"Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang"*, Notarius, Semarang, Vol 1, No 1, 2009.

Tiono, Anthony dan R. Arja Sadjiarto, *Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda*, Tax & Accounting Review, Vol. 3, No.2, 2013.

Sumber Internet

Abdullah, Maryati, "Menguak Beneficial Ownership, Membongkar Kamufase Ekonomi" <https://pwyp-indonesia.org/id/155817/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamufase-ekonomi/>.

Mardatillah, Aida, 2019, "Seminar Nasional 'Refleksi Konstitusi Di Era 4.0 Dalam Upaya Penegakkan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi'", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cc6c36e5eb56/kenali-teori-ini-agar-efektif-menindak-kejahatan-korporasi/>.

Pratama, Sandy Indra, 2015, "Kronologi Kasus Supersemar Rp.4,4 Triliun Soeharto" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150811103858-12-71329/kronologi-kasus-supersemar-rp44-triliun-soeharto>.

Softwan, Rinaldy, 2015, "Teroris Alirkan Dana Lewat Ratusan Ribu Yayasan", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20151228185800-12-100776/teroris-alirkan-dana-lewat-ratusan-ribu-yayasan>.